



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Sistem Pemerintahan Daerah	IP143	Ilmu Pemerintahan	3 SKS	Genap	14 Februari 2023
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ketua Prodi	
	Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Si.		H. Aan Anwar Sihabudin, S.H., M.Si.	Dini Yuliani, S.IP., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL2	Memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, jujur dan beretika dalam melaksanakan tanggung jawabnya.			
	CPL3	Mampu mengimplementasikan konsep dasar ilmu pemerintahan dalam mendukung tugas profesionalnya.			
	CPL4	Mampu mengaplikasikan konsep dan pengetahuan ilmu pemerintahan sebagai dasar kewirausahaan yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal.			
	CPL6	Mampu bekerjasama dalam mengelola bidang pemerintahan untuk mendukung tugas di bawah tanggung jawabnya.			
	CPL7	Mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada stakeholders di bidang pemerintahan dan bidang lain yang terkait.			
	CPL8	Mampu mengevaluasi permasalahan di bidang pemerintahan dan bidang lain yang terkait.			
	CPMK (Capaian Pembelajaran Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah)				
	CPMK1 Mampu menjelaskan konsep dasar Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.				
	CPMK2 Mampu menjelaskan proses pemilihan Kepala Daerah.				
	CPMK3 Mampu menelaah Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.				
	CPMK4 Mampu mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah.				

SUB-CPMK	
	SUB-CPMK1 Mampu menjelaskan konsep dasar Pemerintah Daerah.
	SUB-CPMK2 Mampu memproseskan pembentukan daerah dan kawasan khusus.
	SUB-CPMK3 Mampu membedakan pembagian urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan.
	SUB-CPMK4 Mampu menjelaskan proses pemilihan kepala daerah.
	SUB-CPMK5 Mampu menilai kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
	SUB-CPMK6 Mampu menelaah proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
	SUB-CPMK7 Mampu menjelaskan perumusan Peraturan Daerah (Perda).
	SUB-CPMK8 Mampu menguraikan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai di Tingkat Daerah.
	SUB-CPMK9 Mampu menjelaskan sistem keuangan Daerah.
	SUB-CPMK10 Mampu menjelaskan perencanaan dan pembangunan Daerah.
	SUB-CPMK11 Mampu mendukung wilayah perkotaan.
	SUB-CPMK12 Mampu menjelaskan berkaitan dengan desa.
	SUB-CPMK13 Mampu menjelaskan pelaksanaan kerja sama antar Daerah.
	SUB-CPMK14 Mampu menilai pembinaan dan pengawasan kebijakan Otonomi Daerah.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang: Sistem pemerintahan daerah, otonomi daerah, pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kedudukan dan fungsi DPRD, Peraturan Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah, prinsip kebijakan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, pembentukan kawasan perkotaan dan pedesaan, serta pembinaan dan kebijakan otonomi daerah. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	1. Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah. 2. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. 3. Pembagian Urusan dan Penyelenggaraan Pemerintahan. 4. Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 6. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 7. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 8. Kepegawaian Daerah.

	9. Keuangan Daerah. 10. Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 11. Kawasan Perkotaan. 12. Desa. 13. Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan di Era Otonomi Daerah. 14. Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Otonomi Daerah.
Pustaka	Utama:
	1. Bambang, Trisantono. S (2016). <i>Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> . Bandung: Fokus Media. 2. Chabib, Soleh dan Heru. R (2015). <i>Pengelolaan Keuangan Desa: Edisi Revisi</i> . Bandung: Fokus Media. 3. C.S.T Kansil dan Christine S.T.K (2014). <i>Pemerintahan Daerah di Indonesia</i> . Jakarta: Sinar Grafika. 4. Dian, Bakti. S (2011). <i>Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia</i> . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 5. Mochamad, Solekhan (2012). <i>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> . Malang: Setara Press. 6. Rozali, Abdullah (2005). <i>Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung</i> . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
	Pendukung:
	1. Kuswandi, Aos.(2016). <i>Manajemen Pemerintahan Daerah</i> . Bekasi: UNISMA. 2. Haryanti, Amelia. (2019). <i>Sistem Pemerintahan Daerah</i> . Tangerang Selatan: UNPAM Press.
Dosen Pengampu	1. H. Aan Anwar Sihabudin, S.H., S.IP., M.Si. 2. H. Otong Husni Taufiq, S.IP., M.Si. 3. Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.
Matakuliah syarat	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan (Media dan Sumber Belajar)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	a. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Pemerintah Daerah. b. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar otonomi daerah.	a. Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar Pemerintah Daerah. b. Mampu menjelaskan konsep dasar Otonomi Daerah.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	- Metode ceramah dan tanya jawab secara daring - TM (3x50' menit) - Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Penyampaian RPS. 2. Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. 3. Pengertian Pemerintahan Daerah. 4. Konsep Otonomi Daerah.	5
2	a. Mahasiswa mampu memproseskan pembentukan daerah dan kawasan khusus. b. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi kawasan khusus.	a. Ketepatan dalam memproseskan pembentukan daerah dan kawasan khusus. b. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi kawasan khusus.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	- Metode ceramah dan tanya jawab secara daring - TM (3x50' menit) - Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Pembentukan Daerah sebagai Konsekuensi Kebijakan Desentralisasi. 2. Syarat-syarat Pembentukan Daerah Baru. 3. Pengertian Kawasan Khusus. 4. Fungsi Kawasan Khusus.	5
3	a. Mahasiswa mampu membedakan pembagian urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan. b. Mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan fungsi Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah.	a. Ketepatan dalam membedakan pembagian urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan. b. Ketepatan dalam menjelaskan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk	- Metode ceramah dan tanya jawab secara daring - TM (3x50' menit) - Media <i>Google Classroom</i>, dan	Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	5

		tugas dan fungsi Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah.	presentasi.	<i>Power Point</i>	Tugas dan Fungsi Gubernur. Perangkat Daerah.	
4	a. Mahasiswa mampu mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah. b. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pemilihan kepala daerah.	a. Ketepatan dalam mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah. b. Ketepatan dalam menjelaskan proses pemilihan Kepala Daerah.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Kedaulatan Rakyat. 2. Sistem Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.	5
5	a. Mahasiswa mampu menilai kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD.	a. Ketepatan dalam menilai kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. Ketepatan menjelaskan alat kelengkapan DPRD.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Tugas, Fungsi, Kedudukan dan Kewenangan DPRD. 2. Alat Kelengkapan DPRD. 3. Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD. 4. Penggantian Antar Waktu (PAW).	5
6	a. Mahasiswa mampu menelaah proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemilihan anggota DPRD.	a. Ketepatan dalam menelaah proses pemilihan anggota DPRD. b. Ketepatan dalam menjelaskan sistem pemilihan anggota DPRD.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Sistem Pemilihan Anggota DPRD. 2. Pencalonan Anggota DPRD. 3. Pemungutan Suara. 4. Penetapan Calon Terpilih. 5. Pimpinan dan Keanggotaan DPRD.	5
7	a. Mahasiswa mampu menjelaskan perumusan Peraturan Daerah.	a. Ketepatan dalam menjelaskan perumusan	Kriteria:	• Metode ceramah dan tanya jawab	1. Perumusan Peraturan Daerah (Perda).	5

	b. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari Peraturan Kepala Daerah.	Peraturan Daerah. b. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi dari Peraturan Kepala Daerah.	Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i> , dan <i>Power Point</i>	2. Fungsi Peraturan Kepala Daerah.	
8	Evaluasi Tengah Semester/Ujian Tengah Semester					15
9	a. Mahasiswa mampu menguraikan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai di Tingkat Daerah. b. Mahasiswa mampu menjelaskan pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai di Tingkat Daerah.	a. Ketepatan dalam menguraikan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di tingkat daerah. b. Ketepatan dalam menjelaskan pembinaan dan pengawasan manajemen di Tingkat Daerah.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i> , dan <i>Power Point</i>	1. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai di Tingkat Daerah. 2. Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pegawai di Tingkat Daerah.	5
10	a. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem keuangan daerah. b. Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan tata usaha keuangan daerah.	a. Ketepatan dalam menjelaskan sistem keuangan daerah. b. Ketepatan dalam menjelaskan pelaksanaan tata usaha keuangan daerah.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i> , dan <i>Power Point</i>	1. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Surplus dan Defisit APBD. 5. Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan	5

					APBD. dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 6. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah.	
11	a. Mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan dan pembangunan Daerah. b. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota	a. Ketepatan dalam menjelaskan perencanaan dan pembangunan daerah. b. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Asas Kesatuan Wilayah. 2. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).	5
12	a. Mahasiswa mampu mendukung wilayah perkotaan. b. Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari penataan dan pengendalian pelayanan publik.	a. Ketepatan dalam mendukung wilayah perkotaan. b. Ketepatan dalam menjelaskan manfaat dari penataan dan pengendalian pelayanan publik.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Bentuk dan Ciri Perkotaan. 2. Penataan dan Pengendalian Pelayanan Publik.	5
13	Mahasiswa mampu menjelaskan berkaitan dengan pengertian dari desa. Mahasiswa mampu menyebutkan kelembagaan di tingkat desa.	a. Ketepatan dalam menjelaskan pengertian dari desa. b. Ketepatan dalam menyebutkan kelembagaan di tingkat desa.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Pengertian Desa. 2. Pemerintah Desa. 3. Badan Permusyawaratan Desa. 4. Keuangan dan Kerja Sama Desa.	5

14	a. Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan kerja sama antar Daerah. b. Mahasiswa mampu menyebutkan faktor-faktor timbulnya perselisihan.	a. Ketepatan dalam menjelaskan pelaksanaan kerja sama antar Daerah. b. Ketepatan dalam menyebutkan faktor-faktor timbulnya perselisihan.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah. 2. Faktor-faktor Timbulnya Perselisihan. 3. Upaya Penyelesaian Perselisihan.	5
15	a. Mahasiswa mampu menilai pembinaan dan pengawasan kebijakan Otonomi Daerah. b. Mahasiswa mampu menjelaskan berkaitan dengan pengawasan dari otonomi daerah.	a. Ketepatan dalam menilai pembinaan dan pengawasan kebijakan dari otonomi daerah. b. Ketepatan dalam menjelaskan pengawasan otonomi daerah.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi kuliah. Bentuk Penilaian: Penilaian non-test dalam bentuk presentasi.	• Metode ceramah dan tanya jawab secara daring • TM (3x50' menit) • Media <i>Google Classroom</i>, dan <i>Power Point</i>	1. Pembinaan Otonomi Daerah. 2. Pengawasan Otonomi Daerah. 3. Pertimbangan Kebijakan Otonomi Daerah.	5
16	Evaluasi Akhir Semester/Ujian Akhir Semester					15

	UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN																							
RENCANA TUGAS MAHASISWA (I)																								
MATA KULIAH	Sistem Pemerintahan Daerah																							
KODE	IP143	SKS	3 SKS	SEMESTER	Genap																			
DOSEN PENGAMPU	1. H. Aan Anwar Sihabudin, S.H., S.IP., M.Si. 2. H. Ootong Husni Taufiq, S.IP., M.Si. 3. Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.																							
BENTUK TUGAS																								
Take Home & Self Learning Analisis																								
JUDUL TUGAS																								
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan																								
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH																								
a. Mampu membedakan pembagian urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan. b. Mampu menjelaskan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.																								
DESKRIPSI TUGAS																								
Buatlah makalah lengkap secara individu berkaitan dengan inovasi tata kelola pemerintahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.																								
METODE Pengerjaan Tugas																								
1. Project Based Learning																								
BENTUK DAN FORMAT LUARAN																								
-																								
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN																								
<table><tr><th>KRITERIA</th><th>ANGKA</th><th>INDIKATOR KINERJA</th></tr><tr><td>Sangat Kurang</td><td>0 – 49</td><td>Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak memuat materi sesuai dengan yang ditetapkan pada RPS</td></tr><tr><td>Kurang</td><td>50 – 54</td><td>Rancangan yang disajikan teratur namun belum memuat materi secara lengkap, hanya mengkaji materi secara umum</td></tr><tr><td>Cukup</td><td>55 – 64</td><td>Rancangan yang disajikan tersistematis, membahas masalah-masalah yang sesuai dengan yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa materi yang belum lengkap pembahasannya</td></tr><tr><td>Baik</td><td>65 – 79</td><td>Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif</td></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>≥ 80</td><td>Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif</td></tr></table>							KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA	Sangat Kurang	0 – 49	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak memuat materi sesuai dengan yang ditetapkan pada RPS	Kurang	50 – 54	Rancangan yang disajikan teratur namun belum memuat materi secara lengkap, hanya mengkaji materi secara umum	Cukup	55 – 64	Rancangan yang disajikan tersistematis, membahas masalah-masalah yang sesuai dengan yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa materi yang belum lengkap pembahasannya	Baik	65 – 79	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif	Sangat Baik	≥ 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif
KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA																						
Sangat Kurang	0 – 49	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak memuat materi sesuai dengan yang ditetapkan pada RPS																						
Kurang	50 – 54	Rancangan yang disajikan teratur namun belum memuat materi secara lengkap, hanya mengkaji materi secara umum																						
Cukup	55 – 64	Rancangan yang disajikan tersistematis, membahas masalah-masalah yang sesuai dengan yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa materi yang belum lengkap pembahasannya																						
Baik	65 – 79	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif																						
Sangat Baik	≥ 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif																						

JADWAL PELAKSANAAN
Setelah UTS
DAFTAR RUJUKAN
1. C.S.T Kansil dan Christine S.T.K (2014). <i>Pemerintahan Daerah di Indonesia</i>. Jakarta: Sinar Grafika. 2. Kuswandi, Aos.(2016).<i>Manajemen Pemerintahan Daerah</i>. Bekasi: UNISMA.